



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAODE MUSAFIN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 204067

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.913.853.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , WARISAN Rp. 540.956.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.633.065.000
3. Tanah Seluas 5100 m2 di KAB / KOTA BUTON, WARISAN Rp. 1.061.106.000
4. Tanah Seluas 3600 m2 di KAB / KOTA BUTON, WARISAN Rp. 749.016.000
5. Tanah Seluas 1126 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , WARISAN Rp. 1.248.360.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2876 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , WARISAN Rp. 4.681.350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 141.550.000

1. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.250.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 99.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	858.479.384
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.012.882.384
III. HUTANG	Rp.	35.145.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.977.737.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.